

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jepang merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia, yang mana sumber daya manusia menjadi salah satu faktor dalam menjaga stabilitas perekonomian Jepang. Kebutuhan terhadap sumber daya manusia atau tenaga kerja, memiliki peranan penting bagi Jepang dalam pembangunan ekonomi negara.¹ Peranan tenaga kerja cukup krusial bagi Jepang dalam memberikan kontribusi secara luas terhadap pembangunan ekonomi dan juga non-ekonomi Jepang dalam mencapai kepentingan nasionalnya.² Berdasarkan dengan kebutuhan serta peran penting dari tenaga kerja, menjadikan masalah isu krisis tenaga kerja memberikan dampak buruk bagi Jepang. Krisis tenaga kerja yang terjadi di Jepang berdampak pada beberapa sektor ketenagakerjaan, sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja antara lain sektor pelayanan kesehatan, sektor konstruksi, sektor pertanian dan peternakan, dan juga sektor industri manufaktur.³ Dengan demikian masalah krisis tenaga kerja harus diupayakan penanganannya oleh pemerintah Jepang.

Krisis tenaga kerja atau kekurangan tenaga kerja di Jepang merupakan masalah yang sudah dialami Jepang dalam waktu yang cukup lama. Fenomena krisis tenaga kerja yang terjadi di Jepang merupakan masalah dengan gejalanya berasal dari

¹ Mutia Zahra Nabila, 2020, *Krisis Populasi Tenaga Kerja Produktif di Jepang Pada Tahun 2014-2019*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Sastra Jepang, Universitas Darma Persada

² Nur Fadillah Tombalisa, dkk, *Kerjasama Jepang dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Program Tokutei Ginou Tahun 2019*. Interdependence Journal of International Studies, Vol, 3, No, 2 (2022), Samarinda: Universitas Mulawarman

³ Tia Ayu Sulistyana, 2019, *Kerjasama Internasional Jepang Dengan Indonesia dan Filipina Dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja di Jepang*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

dari perubahan kondisi demografi Jepang yang signifikan terjadi.⁴ Perubahan demografi di Jepang merupakan faktor utama terjadinya krisis tenaga kerja di Jepang, yang mana berupa penuaan populasi serta juga penurunan angka kelahiran di Jepang. Jepang yang mengalami fenomena penuaan populasi dengan usianya mencapai hampir 30% di atas 65 tahun, dengan angka penuaan yang bergerak cepat pada setup tahunnya.⁵ Penuaan populasi yang terus meningkat mengakibatkan kekurangan tenaga kerja di Jepang menjadi bertambah dan semakin sulit untuk ditangani.

Selain itu, penurunan angka kelahiran juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis tenaga kerja di Jepang. Angka kelahiran di Jepang masuk pada rekor salah satu negara dengan angka kelahiran terendah, yang mana pada tahun 2023 angka kelahiran Jepang mencapai hingga 5,1% atau bayi yang lahir sebanyak 758.631.⁶ Angka kelahiran Jepang pada tahun 2023 merupakan yang terendah dalam 90 tahun terakhir, yang mana angka ini masuk pada situasi kritis. Yang berbeda dengan angka kelahiran pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011-2021 angka kelahiran di Jepang mengalami penurunan mencapai 6,6% kelahiran yang hidup per-100.⁷ Sedangkan angka kelahiran yang terdapat pada tahun 2022 sebanyak 770.747 bayi yang lahir.⁸ Penurunan angka populasi yang terus berlanjut, akan mengakibatkan penurunan populasi yang parah di Jepang serta mempengaruhi ekonomi Jepang, sehingga Jepang membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk memperbaiki ekonomi Jepang melalui beberapa sektor ketenagakerjaan.

⁴ *Ibid*

⁵ Mayang Terapulina Br Karo, dkk, *Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe*, Jurnal Transborders, Vol, 4, No, 2 (Juni 2021), Bandung: Universitas Pasundan

⁶ CNN Indonesia, *Angka Kelahiran Jepang Tembus Rekor Terendah Dalam 90 Tahun*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240228114706-113-1068195/angka-kelahiran-jepang-tembus-rekor-terendah-dalam-90-tahun> (1/6/2024, 10:34)

⁷ The World Bank, *Birth rate, Crude(per 1,000 People)-Japan*, diakses melalui https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN?end=2022&locations=JP&name_desc=false&start=196 (1/6/2024, 10:38)

⁸ Shinichi Sekine, *Number of Births Plumets to Under Record-low 800,000 in 2022*, diakses melalui <https://www.asahi.com/ajw/articles/14923326> (1/6/2024, 10:57)

Masalah isu krisis tenaga kerja memberikan dampak yang sangat berpengaruh secara ekonomi dan sosial bagi negara Jepang. Yang mana ketika masalah isu krisis tenaga kerja tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah Jepang, hal tersebut memberikan dampak yang merugikan bagi negara hingga masyarakat Jepang. Dampak ekonomi yang dihasilkan oleh krisis tenaga kerja sendiri dilihat dari Jepang yang mengalami resesi ekonomi, berdasarkan dengan PDB tahun 2023 yang mengalami kontraksi pada dua kuartal. Ekonomi Jepang 2023 menurun pada kuartal pada kuartal III yang mengalami kontraksi (minus) 3,3%, sedangkan pada kuartal IV mencapai 0,4%.⁹ Pada tahun 2024, ekonomi Jepang secara kuartalan mengalami kontraksi sebesar 0,5%, dan pada kuartal I sebesar 2% yang dinyatakan lebih buruk dibandingkan dengan yang diekspektasikan ekonom.¹⁰

Hal ini juga memberikan dampak pada pasar tenaga kerja terdapat pada produktivitas angkatan kerja Jepang yang telah mengalami penurunan pada empat tahun terakhir.¹¹ Lebih dari 50% perusahaan yang berada di Jepang mengalami kekurangan dan kesulitan dalam mencari tenaga kerja *full time* pada sektor-sektor tertentu.¹² Dilihat dari berkurangnya tenaga kerja terdapat pada beberapa sektor seperti sektor manufaktur, sektor konstruksi, sektor pertanian dan peternakan, serta juga sektor pelayanan. Pada sektor manufaktur yang terdiri dari industri elektronik, otomotif, dan juga mesin yang mengalami kekurangan tenaga kerja sebanyak 1 juta tenaga kerja, lalu pada sektor konstruksi yang mencakup proyek pembangunan

⁹ M Rosseno Aji Nugroho, *5 Fakta Terungkap, Ini Biang Kerok Ambruknya Ekonomi Jepang*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240222142628-4-516762/5-fakta-terungkap-ini-biang-kerok-ambruknya-ekonomi-jepang> (29/9/2024, 06:02)

¹⁰ CNBC Indonesia, *Ekonomi Jepang Babak Belur, PDB Kuartal I-2024 Kontraksi 2%*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240516084838-4-538578/ekonomi-jepang-babak-belur-pdb-kuartal-i-2024-kontraksi-2> (29/9/2024, 06:010)

¹¹ Michael Wolf, *Japan Economic Outlook, July 2024*, diakses melalui <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/asia-pacific/japan-economic-outlook.html> (29/9/2024, 06:23)

¹² Banjemin Baskara, *Jepang Terancam Dua Krisis Besar, Populasi Lansia dan Kekurangan Tenaga Kerja*, diakses melalui <https://jurnalpatrolineews.co.id/internasional/jepang-terancam-dua-krisis-besar-populasi-lansia-dan-kekurangan-tenaga-kerja> (29/9/2024, 06:44)

perumahan serta infrastruktur mengalami kekurangan tenaga kerja sebanyak 500.000 tenaga kerja dalam sektor tersebut.¹³ Dalam sektor pertanian juga membutuhkan pekerja sebanyak 300.000, sedangkan pada sektor pelayanan membutuhkan pekerja sebanyak 700.000 dalam pelayanan kesehatan, serta industri perhotelan dan juga restoran.¹⁴

Dampak-dampak yang diberikan dari masalah isu krisis tenaga kerja, memberikan kekhawatiran bagi Jepang jika tidak dilakukannya upaya dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah Jepang menjadikan krisis tenaga sebagai masalah yang krusial, sehingga menjadi perhatian khusus yang harus dilakukan upaya penanganannya. Oleh karena itu krisis tenaga kerja di Jepang menjadi fokus perdana menteri Fumio Kishida dan juga perdana menteri sebelumnya dalam melakukan upaya untuk menangani masalah isu krisis tenaga kerja. Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang sebelumnya juga melakukan beberapa upaya secara internal maupun eksternal untuk menangani masalah tersebut, yang mana Shinzo Abe melakukan salah satu upaya pada tahun 2013 membentuk kebijakan *womenomics* dengan tujuan untuk meningkatkan peran partisipasi perempuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang, dan juga partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi serta politik.¹⁵ Pada tahun 2018, Shinzo Abe juga melakukan upayanya dengan revisi Undang-Undang kontrol imigrasi untuk menerima tenaga kerja asing melalui program *Specified Skilled Workers* (SSW).¹⁶ Hal ini dilakukan Shinzo Abe untuk menarik pekerja asing untuk

¹³ Robby Sanjaya, *Krisis Tenaga Kerja Mengancam Ekonomi Jepang: Dampak Pandemi dan Aging Population*, diakses melalui <https://kebandung.pikiran-rakyat.com/teras/pr-3958387479/krisis-tenaga-kerja-mengancam-ekonomi-jepang-dampak-pandemi-dan-aging-population?page=all> (29/9/2024, 07:16)

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Sultan Aziz Wara, 2024, *Analisis Keputusan Jepang Dalam Memperbaharui Kebijakan Tenaga Kerja Asing Pada Tahun 2019*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹⁶ Tia Ayu Sulistyana, *Op.Cit*

bekerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dengan membuka 14 sektor ketenagakerjaan di Jepang.¹⁷

Fumio Kishida sebagai perdana menteri yang sedang menjabat juga menjadikan masalah isu krisis tenaga kerja di Jepang sebagai salah satu fokus utama dalam pemerintahannya. Pada upaya yang dilakukan oleh Fumio Kishida dalam menangani masalah isu krisis tenaga kerja di Jepang, juga melakukan upaya secara internal dan eksternal. Fokus Fumio Kishida pada upaya internal sendiri dengan menggunakan kebijakan ekonomi dan sosial. Yang mana dilakukannya dukungan finansial pada setiap keluarga di Jepang dengan tujuan untuk membesarkan anak yang ditujukan bagi setiap anak dan rumah tangga.¹⁸ Berdasarkan dengan RUU terkait revisi UU perluasan tunjangan anak, pemerintah Jepang memperkirakan dukungan anggaran tersebut akan menghabiskan biaya 3,4 triliun yen, dilihat dari bantuan yang diberikan berkaitan dengan kehamilan dan persalinan sebesar 100.000 yen (650 dolar), serta terkait tempat penitipan anak.¹⁹ Selain itu, Fumio Kishida sendiri melakukan peningkatan pada tenaga kerja perempuan dengan menargetkan pada tahun 2030 bahwa sekitar 30% tenaga kerja profesional perempuan harus diposisikan eksklusif pada perusahaan-perusahaan besar di Jepang atau perusahaan yang terdaftar pada *Tokyo Stock Exchange Prime Market*.²⁰ Pemberdayaan lansia dalam tenaga kerja juga dilakukan dengan peningkatan usia pensiun yang akan dinaikan secara bertahap

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Prime Minister's Office of Japan, *Policies Supporting Children and Child-rearing*, diakses melalui https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/policies_kishida/childsupport.html (24/3/2024, 09:44)

¹⁹ NHK World Japan, *Undang-Undang Baru Untuk Memperluas Upaya Tunjangan Anak*, diakses melalui <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/0607EE73/> (25/3/2024, 13:02)

²⁰ The Asahi Shimbun, *Kishida calls for plan to have women in 30% of top jobs by 2030*, diakses melalui <https://www.asahi.com/ajw/articles/14895433> (30/3/2024, 20:40 WIB)

yang dimana pada April 2023 dinaikan menjadi 61 tahun dan akan berlanjut hingga mencapai 65 tahun pada tahun 2031.²¹

Sedangkan pada upaya eksternal menggunakan kebijakan imigrasi serta kerjasama internasional. Sebagai bagian dari respon terhadap krisis di tempat kerja, pemerintahan Fumio Kishida menerapkan sejumlah kebijakan dan program yang dilakukan berdasarkan dengan program kerjasama yang sudah pernah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya, namun dengan kapasitas yang lebih besar dilakukan Fumio Kishida. Dalam upayanya dilakukan penerimaan pekerja asing yang dilakukan Fumio Kishida, yang mana terdapat program Program Visa *Specified Skilled Workers* (SSW) yang merupakan program yang masuk pada kebijakan imigrasi dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa negara, serta pada pemerintahan Fumio Kishida melakukan perluasan dan pembukaan sektor kerja lainnya pada SSW tipe 2 dengan target penerimaan pekerja asing sebanyak 820.000 pekerja pada 14 sektor ketenagakerjaan dalam lima tahun kedepan.²² Selain itu juga pemerintah melakukan kerjasama internasional melalui program kerjasama *Technical Intern Training Program* (TITP) dan *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang dilakukan pengiriman tenaga kerja asing pada bidang kesehatan dengan negara Indonesia dan Filipina hingga tahun 2024.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, penelitian terkait dengan upaya pemerintahan Fumio Kishida dalam menangani masalah krisis tenaga kerja di Jepang menarik untuk diteliti. Pada penelitian ini memiliki urgensi untuk mengetahui upaya pemerintah Jepang yang khususnya pada pemerintahan Fumio Kishida melakukan

²¹ Joss, *Jepang Naikkan Batas Usia Pensiun Hingga 65 Tahun Atasi Kekurangan Tenaga Kerja*, diakses melalui <https://joss.co.id/2023/03/jepang-naikkan-batas-usia-pensiun-hingga-65-tahun-atasi-kekurangan-tenaga-kerja/> (30/3/2024, 20:57)

²² Kompas.com, *Bekal Kerja di Jepang, Ada 4 Industri Baru Pada Program SSW atau Tokutei Gino*, diakses melalui <https://ohayojepang.kompas.com/read/2327/bekal-kerja-di-jepang-ada-4-industri-baru-pada-program-ssw-atau-tokutei-gino?page=all> (11/10/2024, 13:06)

upaya untuk menangani masalah isu krisis tenaga kerja di Jepang. Penelitian akan membahas terkait upaya Fumio Kishida untuk menangani krisis tenaga kerja di Jepang dengan berupaya menangani masalah tersebut secara internal hingga eksternal.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pemerintahan Fumio Kishida menangani masalah isu krisis tenaga kerja di Jepang?

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintahan Fumio Kishida melakukan upaya untuk menangani masalah isu krisis tenaga kerja atau kurangnya tenaga kerja di Jepang.

1.2.2 Manfaat Penelitian

1.2.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian yang melakukan ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang baru, serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang terkait upaya pemerintahan Fumio Kishida dalam menangani masalah isu krisis tenaga kerja. Serta diharapkan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pemikiran pada peneliti selanjutnya yang membahas terkait fenomena atau masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.2.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis yang dapat menjadi referensi untuk memperbanyak literatur bagi penelitian selanjutnya yang meneliti fenomena yang sama. Sehingga dapat memberikan manfaat, yang khususnya pada akademisi pada bidang studi Hubungan Internasional dengan pemahaman terkait

dengan upaya yang pemerintahan Fumio Kishida menangani masalah krisis tenaga kerja yang terjadi di Jepang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memasukkan beberapa penelitian terdahulu untuk di review agar menjadi tinjauan untuk penulisan. Pada **penelitian pertama** berjudul **“Efektivitas Kebijakan Sekuritisasi Jepang Untuk Mengatasi Isu Penurunan Angka Kelahiran Tahun 2005-2022”** yang ditulis oleh Anmita Intan Fatimah, dkk.²³ Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada upaya untuk mengatasi penurunan angka kelahiran yang terjadi di Jepang. Isu penurunan angka kelahiran yang terjadi di Jepang menjadi salah-satu fenomena ini sendiri juga sangat berdampak pada sektor ekonomi serta keamanan, yang disebabkan kurangnya usia produktif untuk mengisi tenaga kerja pada sektor industri yang ada di Jepang.

Peneliti pada Jurnal ini melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas dari upaya sekuritisasi Jepang dalam meningkatkan angka kelahiran di Jepang. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Fumio Kishida mengakui bahwa penurunan angka kelahiran serta pernikahan merupakan kondisi yang tidak ideal, serta menjadi penghambat negara dalam menjaga kelangsungan fungsi sosial. Sehingga isu ini di Jepang menjadi program yang sulit untuk pembuatan kebijakan di negara tersebut. Hal ini menjadikan pemerintah Jepang secara konsisten telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan usia harapan hidup dengan memberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya, antara lain, sebagai cara untuk menangani sebagian masalah yang dihadapi.

Jepang melakukan beberapa langkah untuk mengurangi penurunan angka kelahiran di negara tersebut. Kebijakan sekuritisasi mulai lakukan programnya di

²³ Anmita Intan Fatimah, dkk, *Efektivitas Kebijakan Sekuritisasi Jepang Untuk Mengatasi Isu Penurunan Angka Kelahiran Tahun 2005-2022*, Jurnal Pena Wimaya, Vol. 4, No, 1 (Januari 2024), Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta, hal. 38-64.

tahun 2008, walaupun kebijakan tersebut nyatanya sudah mulai diuji coba pada tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana dari tahun 2008 tersebut, pemerintah sudah mulai rutin menggambarkan secara khusus keuangan negara untuk kebijakan tersebut. Sehingga isu tersebut dapat dikatakan berhasil ter sekuritisasi, namun hal tersebut belum dapat dikatakan efektif dan sepenuhnya berhasil dalam menangani isu penurunan angka kelahiran dan pernikahan. Hal ini dilihat dari masih banyaknya dampak yang buruk sehingga tidak memberikan dampak yang lebih baik, yang mana terjadi pada pemerintahan Shinzo Abe.

Sehingga penelitian tersebut terdapat kebijakan yang untuk meningkatkan angka kelahiran, yang mana sama dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti terhadap upaya pemerintahan Fumio Kishida yang dilakukan hingga sekarang terhadap peningkatan pada angka kelahiran di Jepang. Yang berbeda bahwa penelitian pada jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan sekuritisasi yang dilakukan dari tahun 2008, yang ternyata tidak berhasil. Sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah ingin mengetahui bagaimana Fumio Kishida melakukan kebijakan peningkatan angka kelahiran sebagai bentuk upaya untuk menangani krisis tenaga kerja yang terjadi.

Penelitian kedua berjudul **“Program Society 5.0 Sebagai Strategi Jepang Dalam Menghadapi Masalah Kurangnya Tenaga Kerja Akibat Ageing Society”** merupakan Jurnal yang ditulis oleh Trian Habib Goffary, dkk.²⁴ Pembahasan yang terdapat pada penelitian ini adalah peneliti yang berfokus pada strategi Jepang dalam menghadapi masalah Ageing Society yang sedang dialami negaranya melalui program Society 5.0. Yang mana dapat dilihat bahwa negara Jepang mengalami kurangnya

²⁴ Trian Habib Goffary, dkk, 2023, *Program Society 5.0 Sebagai Strategi Jepang Dalam Menghadapi Masalah Kurangnya Tenaga Kerja Akibat Ageing Society*, Skripsi, Mataram: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Mataram, hal. 1-7

usia produktif yang dapat dikaitkan dengan tekad wanita untuk tidak memiliki anak, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pendapatan tahunan negara.

Program *Society 5.0* merupakan salah satu bentuk strategi ekonomi pembangunan *Society 5.0* menjelaskan hubungan antara dunia alami dan ruang fisik yang diperluas, memungkinkan kecerdasan buatan (AI) berdasarkan kumpulan data yang besar dan robot untuk mendukung pekerjaan manusia dan interaksi manusia-mesin, serta hal ini dapat mengoptimalkan semua sistem dan organisasi. Hal ini membentuk peradaban 5.0 sebagai masyarakat yang berpusat pada setiap individu dan tidak bergantung pada masa lalu yang dicirikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan. Pada pengimplementasian penggunaan teknologi dalam berkelanjutan *Society 5.0* di Jepang untuk menggantikan tenaga kerja manusia yang berkurang di Jepang. Contohnya penggunaan teknologi berkelanjutan di *The Capital Tokyo, Matsuyama City*, dan *Keihanna Science City*.

Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang diteliti ini, yang mana menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan dengan menggunakan program *Society 5.0*, yang mana hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pada pemerintahan Fumio Kishida dengan menggunakan teknologi. Teknologi sendiri menjadi salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan Jepang terhadap kekurangan tenaga kerja manusia, sehingga hal ini dapat cukup efektif untuk menjadi solusi dari penyelesaian masalah krisis tenaga kerja di Jepang.

Penelitian ketiga berjudul “**Faktor Aging Population di Jepang dan Upaya Pemerintah Jepang Dalam Mengatasi Fenomena Tersebut**” merupakan jurnal yang ditulis oleh Mochamad Bintang Putra Eryano, dkk.²⁵ Pada penelitian ini berfokus pada faktor terjadinya *aging population* di Jepang, yang mana pada hasil

²⁵ Mochamad Bintang Putra Eryano, dkk, *Faktor Aging Population di Jepang dan Upaya Pemerintah Jepang Dalam Mengatasi Fenomena Tersebut*, Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol, 18, No, 2 (2023), Semarang: Universitas Diponegoro

penelitian ini menyatakan bahwa Fenomena *aging population* yang terdapat di Jepang, disebabkan dari penurunan angka kelahiran, urbanisasi, perubahan gaya hidup, serta juga peran gender yang masih tradisional. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas terkait *aging population* menjadi faktor terjadinya penyusutan atau berkurangnya tenaga kerja di Jepang. Sedangkan perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan teori perubahan sosial yang difokuskan membantu untuk memecahkan faktor-faktor terjadinya *aging population*, sedangkan pada penelitian yang sedang diteliti ini menggunakan kebijakan publik dalam meneliti terkait upaya yang dilakukan pemerintah Jepang dalam menangani masalah krisis tenaga kerja yang terjadi di Jepang.

Penelitian keempat berjudul **“Kerjasama Internasional Jepang Dengan Indonesia Dan Filipina Dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Di Jepang”** ditulis oleh Tia Ayu Sulistyana.²⁶ Pada penelitian ini peneliti berfokus pada kerjasama internasional yang dilakukan untuk penyelesaian masalah Jepang mengenai kekurangan tenaga kerja. Jepang dengan masalah perubahan demografi yang menjadi masalah besar serta hambatan untuk perekonomian Jepang, sehingga Jepang mengambil konsep kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri yang ada di Jepang. Pada penelitian ini juga memiliki persamaan, yang dimana kerjasama internasional merupakan salah satu upaya pemerintahan Fumio Kishida melakukan pengimigrasian agar memasukan tenaga kerja asing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Perbedaannya ialah penelitian ini dan penelitian tersebut berfokus pada kerjasama internasional Jepang dengan Indonesia serta Filipina pada upaya pemerintah Jepang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, sedangkan

²⁶ Tia Ayu Sulistyana, 2019, *Kerjasama Internasional Jepang Dengan Indonesia Dan Filipina Dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Di Jepang*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 1-6.

pada penelitian yang sedang diteliti ini akan menjadikan kebijakan publik menjadi salah satu upaya dari pemerintah Jepang pada pemerintahan Fumio Kishida untuk meminimalisir krisisnya tenaga kerja.

Penelitian kelima berjudul “**Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Menangani Krisis Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Indonesia Dan Filipina**” ditulis oleh Angela Certa Anisya.²⁷ Pada penelitian ini berfokus pada mengenai masalah krisis tenaga kerja produktif khusus tenaga kesehatan yang diakibatkan oleh fenomena *aging population* Pemerintah Jepang melakukan upaya untuk meminimalisir hal tersebut dengan bekerjasama melalui *Economic Partnership Agreement* (EPA), melalui ini Jepang melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan juga *philippines-Japan Economic Partnership Agreement* (PJEPA), mengenai perekrutan tenaga kesehatan untuk Jepang. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas upaya dari pemerintah untuk meminimalisir krisis tenaga kerja dengan upaya yang dilakukan dengan kerjasama, namun perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus ke kerjasama internasional khususnya menangani krisis tenaga kesehatan di Jepang, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini akan membahas beberapa upaya dari pemerintahan Fumio Kishida dalam menangani krisis tenaga kerja yang contohnya kebijakan kerja dan upah untuk perempuan.

Penelitian keenam berjudul **Kebijakan dan Dukungan Perusahaan Dalam Memanfaatkan Keahlian Pengalaman Lansia Untuk Tetap Bekerja (Studi Kasus Pada Negara Jepang)** ditulis oleh Suryadi.²⁸ Pada penelitian membahas terkait

²⁷ Angela Certa Anisya, 2019, *Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Menangani Krisis Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Indonesia Dan Filipina*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 4-5.

²⁸ Suryadi, *Kebijakan dan Dukungan Perusahaan Dalam Memanfaatkan Keahlian Pengalaman Lansia Untuk Tetap Bekerja (Studi Kasus Pada Negara Jepang)*, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol, 14, No, 2 (Juli-Desember 2019), Jakarta Selatan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan

kebijakan dan juga dukungan dari perusahaan Jepang yang diberikan pada lansia dalam pemanfaatan keahlian dalam angkatan kerja di Jepang, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Jepang yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Terkait kebijakan yang diberikan oleh perusahaan di Jepang kepada lansia, para pekerja lansia berpendapat dan setuju terkait kebijakan pengkaryaan kembali. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan perusahaan di Jepang melakukan kebijakan tersebut, antara lain untuk meningkatkan harapan hidup, serta juga dilakukan berdasarkan dengan pemberitahuan dari pemerintah Jepang memberdayakan lansia dalam angkatan kerja untuk meningkatkan produktivitas perusahaan di Jepang yang disebabkan kurangnya tenaga kerja.

Pada penelitian ini terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang diteliti peneliti, yang mana terdapat persamaan pada penelitian ini membahas beberapa terkait alasan pembuatan kebijakan yang dilakukan perusahaan di Jepang yang dilatarbelakangi oleh pemerintah Jepang dalam upaya menangani kekurangan tenaga kerja dengan memberdayakan lansia, juga untuk meningkatkan produktivitas perusahaan atau dalam angkatan kerja di Jepang yang menjadi salah satu negara anggota OECD yang memiliki produktivitas yang masuk pada angka terendah. Sedangkan pada perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan metode data sekunder dengan jenis data kualitatif serta juga kuantitatif, pada penelitian ini juga menggunakan studi *literature/desk* yang digunakan untuk menganalisis terkait tanggapan lansia dengan kebijakan pengkaryaan atau kembali di pekerjaan yang dilakukan perusahaan Jepang, yang mana khususnya pada industri manufaktur dan juga ingin mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi perusahaan Jepang melakukan kebijakan atau mempekerjakan kembali lansia. Lalu pada penelitian yang diteliti peneliti ini, menggunakan metode deskripsi serta analisis data kualitatif dalam

mencari data yang membahas terkait upaya pemerintahan Fumio Kishida memberdayakan lansia dalam angkatan kerja untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja di Jepang, serta meningkatkan produktivitas angkatan kerja di Jepang pada upaya internalnya, yang mana tidak meneliti terkait pendapat atau tanggapan para lansia terkait kebijakan pemerintah dalam mempekerjakan kembali lansia dalam angkatan kerja di Jepang.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1	Efektifitas Kebijakan Sekuritisasi Jepang Untuk Mengatasi Isu Penurunan Angka Kelahiran Tahun 2005-2022 Oleh : Anmita Intan Fatimah, dkk.	Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif Alat Analisa : Teori Sekuritisasi Teori Evaluasi Kebijakan Publik	Kebijakan yang ditetapkan Jepang masih belum efektif karena pemerintah cenderung lebih fokus dalam penanganan masalah yang timbul di permukaan, ketimbang meninjau dan mengupayakan perubahan sistem yang ada di masyarakat.
2	Program Society 5.0 Sebagai Strategi Jepang Dalam Menghadapi Masalah Kurangnya Tenaga Kerja Akibat Ageing Society Oleh : Trian Habib Goffary, dkk	Jenis penelitian : Kualitatif Alat analisa : Konsep <i>Technology and Development</i> Konsep Revolusi Industri 4.0 Konsep Society 5.0	Memberi gambaran strategi Jepang dalam menghadapi masalah Ageing Society yang sedang dialami negaranya melalui program Society 5.0
3	Faktor <i>Aging Population</i> di Jepang dan Upaya	Jenis Penelitian : Kualitatif	Fenomena <i>aging population</i> yang terdapat di Jepang, disebabkan dari

	<p>Pemerintah Jepang Dalam Mengatasi Fenomena Tersebut</p> <p>Oleh : Mochamad Bintang Putra Eryano, dkk</p>	<p>Alat analisa : Teori Perubahan Sosial</p>	<p>penurunan angka kelahiran, urbanisasi, perubahan gaya hidup, serta juga peran gender yang masih tradisional.</p>
4	<p>Kerjasama Internasional Jepang Dengan Indonesia Dan Filipina Dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Di Jepang</p> <p>Oleh : Tia Ayu Sulistyana</p>	<p>Jenis Penelitian : Deskriptif-Eksplanatif Kualitatif</p> <p>Alat Analisa : Konsep Kerjasama Internasional</p>	<p>Krisis pada usia produktif menjadi sebuah faktor terjadinya krisis tenaga kerja di Jepang, sehingga mendorong Jepang untuk melakukan upaya dengan melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan pada kurangnya tenaga kerja dengan usia produktif, serta jika dilihat berdasarkan faktor sosial, para lansia yang tetap produktif pada masa tuanya dapat menunjukkan kepuasan terhadap hidupnya, serta produktif ini untuk menghindari isolasi sosial pada kalangan lansia di Jepang</p>
5	<p>Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Menangani Krisis Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Indonesia Dan Filipina</p>	<p>Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif</p> <p>Alat Analisa : - Kebijakan Luar Negeri - Kemitraan Ekonomi</p>	<p>Fenomena <i>Aging population</i> merupakan dasar pada pembuatan kebijakan kerjasama Jepang dengan Indonesia dan serta Filipina dengan <i>Economic Partnership</i></p>

	Oleh : Angela Certa Anisya		<i>Agreement</i> (EPA) pada pengiriman tenaga kesehatan serta perawat ke Jepang.
6	Kebijakan dan Dukungan Perusahaan Dalam Memanfaatkan Keahlian Pengalaman Lansia Untuk Tetap Bekerja (Studi Kasus Pada Negara Jepang) Oleh: Suryadi	Jenis Penelitian: Kualitatif dan kuantitatif Alat Analisa: Studi <i>literature/desk</i>	Terdapat lansia yang berpendapat setuju terkait kebijakan pengkaryaan kembali atau mempekerjakan kembali pada perusahaan Jepang, yang mana untuk memenuhi kebutuhan kurangnya tenaga kerja di perusahaan Jepang, khususnya pada industri manufaktur. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan perusahaan di Jepang melakukan kebijakan tersebut, antara lain untuk meningkatkan harapan hidup, serta juga dilakukan berdasarkan dengan pemberitahuan dari pemerintah Jepang memberdayakan lansia dalam angkatan kerja untuk meningkatkan produktivitas perusahaan di Jepang yang disebabkan kurangnya tenaga kerja. Terdapat juga elastisitas tenaga kerja lansia berdasarkan

			kelompok umur yang dilakukan peneliti dengan uji regresi linear berganda, elastisitas pada umur pekerja lansia 65 tahun keatas sebesar 0,181, dan untuk pekerja yang berusia 55-64 sebesar 0,398 lebih besar, serta untuk kelompok pekerja dengan umur 15-54 sebesar 1,476 dan lebih tinggi dari kelompok pekerja lainnya.
--	--	--	--

1.4 Teori/ Konsep

1.4.1 Kebijakan Publik (Public Policy)

Kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dalam suatu negara, yang mana juga mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara agar menjadi lebih tertib, serta dapat menikmati kesejahteraan dengan maksimal.²⁹

Kebijakan publik yang juga merupakan kebijakan negara, yang kebijakannya dirumuskan serta disetujui secara publik diharapkan agar tercapai dengan bantuan dari pihak pemerintah serta masyarakat dalam suatu negara.³⁰ Kebijakan publik (*Public Policy*) menurut Thomas R. Dye dalam bukunya yang berjudul "*Understanding Public Policy*" yang berisi pendapatnya terkait kebijakan publik, "*Whatever government choose to do or not to do*" merupakan pendapat Dye terkait kebijakan publik, yang mana kebijakan publik dapat dianalisis untuk menentukan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat.³¹

²⁹ Eko Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya, hal . 1

³⁰ *Ibid.*, hal. 7

³¹ Thomas R. Dye, 2002, *Understanding Public Policy* (ed.10), New Jersey: Prentice Hall

Hal tersebut juga termasuk mengidentifikasi apa yang menghalangi pemerintah untuk menegakkan kebijakan saat ini dan memeriksa efek dari kebijakan yang sedang diterapkan pada masyarakat.³²

Pendapat Thomas R. Dye terkait kebijakan publik juga disetujui oleh Anderson, yang mana Anderson juga berpikir bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang di yang dikembangkan dan juga dirumuskan oleh pemerintah pada suatu negara.³³ Kebijakan publik menurut James Anderson juga difokuskan pada tindakan atau juga keputusan yang berkaitan dengan masalah yang harus diatasi untuk mencapai hasil yang diinginkan, tujuan tersebut dinyatakan dengan jelas sebagai tujuan umum dan bukan tujuan pribadi atau kelompok.³⁴ Sehingga pendapat dari keduanya bukan hanya tertuju pada aktivitas-aktivitas yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pemerintah, namun aktivitas yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan yang diputuskan pemerintah berkaitan dengan kepentingan nasional atau kebijakan tersebut ditujukan untuk publik dalam suatu negara dapat menyelesaikan masalah publik. Anderson juga menyatakan bahwa “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” yang dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu dan diikuti oleh seorang dan sekelompok aktor yang menangani suatu masalah yang menjadi perhatian publik dan ditujukan secara umum dalam suatu lingkungan (negara).³⁵

³² *Ibid*

³³ James E. Anderson, *Public Policy Making* (ed.4), Boston and New York: Houghton Mifflin Company, dalam Uly Nuzzulian, 2008, *Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi: Studi Kasus Setelah Perjanjian Sevres Tahun 1920*, Tesis, Jakarta: Jurusan Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia, hal. 18

³⁴ Eko Handoyo, *Op. Cit*, hal. 6

³⁵ James Naderson, dalam Ageng Purwo Jatmiko, *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya Sebagai Kearifan Lokal*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta

James Anderson juga menyatakan bahwa pada kebijakan publik juga terdapat lima ciri yang menjelaskan terkait kebijakan publik. Lima ciri kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anderson:

- a. Kebijakan publik tidak bersifat serampangan atau tidak disengaja, pada umumnya kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu atau berfungsi sebagai pedoman berdasarkan tujuan tersebut.
- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah, dan bukan tindakan dan juga keputusan yang berdiri sendiri atau terpisah dengan tindakan yang dibuat oleh pemerintah.
- c. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan atau diyakini akan dilakukan atau mengikuti apa yang ingin mereka lakukan.
- d. Kebijakan publik dapat memiliki dampak positif dalam beberapa bentuk, seperti beberapa bentuk saran pemerintah mengenai masalah tertentu, atau juga memiliki dampak negatif dalam bentuk tertentu, seperti arahan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan apapun.
- e. Kebijakan publik juga merupakan kebijakan yang berlandaskan hukum dan bersifat otoritatif.

Berdasarkan dengan pandangan para peneliti terkait kebijakan publik yang merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama untuk suatu negara. Kebijakan publik dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah, sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Dengan menegakkan hukum, peraturan, dan program yang relevan, pemerintah dapat membawa perubahan yang signifikan di semua bidang kehidupan masyarakat. Melalui kebijakan publik, pemerintah dapat memobilisasi

sumber daya yang berupa material, sumber daya manusia, dan keuangan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial yang sedang terjadi dalam suatu negara.

Kebijakan publik dapat diklasifikasi dalam cakupan yang luas pada beberapa bidang, yakni terdapat bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, hingga kesehatan. Yang mana berdasarkan dengan pendapat Chandler dan Plano menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan alat yang strategis dapat digunakan dengan sumber daya yang ada dengan menyelesaikan masalah-masalah publik atau pemerintah.³⁶ Selanjutnya disebutkan bahwa kebijakan publik adalah suatu bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah secara bertahap untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang terpinggirkan agar dapat hidup layak dan berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.³⁷ Sehingga dalam pendapat Chandler dan Plano pada kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah, yang mana pemerintah menggunakan berbagai instrumen yang tersedia untuk menginterpretasikan terkait masalah publik dalam negara.³⁸

Berdasarkan dengan pemaparan terkait dengan kebijakan publik, penelitian ini sejalan dengan konsep kebijakan publik yang merujuk pada kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan tujuan untuk menangani masalah publik. Konsep kebijakan publik berkaitan dengan penelitian ini, yang penelitian ini membahas terkait upaya pemerintahan Fumio Kishida dalam menangani masalah krisis tenaga kerja di Jepang, yang mana salah satu upaya yang dibahas merupakan upaya domestik. Sehingga dilihat dari klasifikasi kebijakan publik yang juga mencakup terkait bidang sosial dan ekonomi, berkaitan dengan penelitian ini yang membahas terkait kebijakan

³⁶ Ralph C. Chandler dan Jack C. Plano, 1982, *The Public Administration Dictionary*, John Wiley and Sons, dalam Risma Setari Amiri dkk, *Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Administrasi Publik, Vol, 4, No, 48 (2017), Manado: Universitas Sam Ratulangi, hal. 3

³⁷ *Ibid*

³⁸ Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta: Y.A.P

sosial dan juga politik yang masuk pada upaya domestik pemerintah dalam menangani krisis tenaga kerja di Jepang. Sehingga kebijakan publik dapat digunakan untuk sebagai alat penelitian ini yang membahas terkait masalah krisis tenaga kerja di Jepang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Pada metode penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang sudah terjadi atau fenomena yang sedang terjadi sekarang, dengan mengumpulkan data berdasarkan fakta.³⁹ Metode penelitian deskriptif ini juga biasanya digunakan untuk penelitian yang menjawab pertanyaan “bagaimana”.⁴⁰ Penulis pada penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai bagaimana pemerintah Jepang dalam melakukan upaya untuk menangani masalah krisis tenaga kerja yang diakibatkan oleh beberapa faktor populasi atau perubahan kondisi demografi di Jepang, angka kelahiran di Jepang yang menurun, serta juga stagnasi ekonomi Jepang yang sudah terjadi dari tahun 1990.

1.5.2 Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang mana data-data yang digunakan pada teknik analisa data kualitatif ini merupakan data yang berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.⁴¹ Sehingga penulis mengumpul data untuk mendukung penelitian ini untuk

³⁹ Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, *Tipe Penelitian Deskripsi Ilmu Komunikasi*, Jurnal Diakom, Vol, 1, No, 2 (Desember 2018), Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

⁴⁰ Endi Haryono dan Saptopo B. Ilkodar, 2009, *Menulis Skripsi: Panduan Untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional (ed.2)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁴¹ Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif (ed.1)*, Makassar: Syakir Media Press

dijadikan sebagai pendukung pada konsep dalam menjelaskan upaya pemerintah Jepang untuk krisis tenaga kerja yang terjadi.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik *library research* atau juga studi pustaka, adalah mengumpulkan data yang berupa informasi-informasi yang berasal dari buku, jurnal, tesis, artikel, serta juga berita online yang berkaitan permasalahan yang diteliti oleh penulis.⁴²

1.5.3.1 Batasan Materi

Sehubungan masalah yang dibahas mengenai upaya pemerintahan Fumio Kishida dalam melakukan upaya untuk menangani masalah pada isu krisis tenaga kerja di Jepang, serta juga akan membahas juga mengenai faktor terjadinya fenomena krisis tenaga kerja tersebut. Maka untuk penelitian ini tidak menjadi melebar lebih luas mengenai pembahasan terhadap upaya pemerintah untuk krisis tenaga kerja, penulis hanya akan membahas faktor terjadinya masalah krisis tenaga kerja, yaitu faktor populasi atau perubahan kondisi demografi di Jepang yang sudah menua. Faktor lainnya juga pada angka kelahiran di Jepang yang terus menurun pada setiap tahunnya, serta juga stagnasi ekonomi Jepang yang sudah terjadi dari tahun 1990. Penelitian ini juga akan membahas terkait dampak yang diakibatkan dari krisis tenaga kerja di Jepang, seperti rendahnya produktivitas angkatan kerja di Jepang, serta berkurangnya tenaga kerja pada sektor-sektor penting di Jepang. Serta membahas terkait upaya yang dilakukan Fumio Kishida mulai dari kebijakan internal hingga pada upaya eksternal untuk menangani krisis tenaga kerja yang menjadi masalah utama di Jepang yang sangat merugikan.

⁴² Rianto Adi dan Heru Prasadja, 1991, *Langkah-Langkah Penelitian Sosial* (ed.2), Jakarta: Penerbit ARCAN

1.5.3.2 Batasan Waktu

Pada penelitian yang akan dibahas ini pada batasan waktunya dimulai dari Fumio Kishida mulai menjabat sebagai perdana menteri Jepang, yaitu dimulai dari tahun 2022 sampai pada bulan Agustus 2024. Yang dimana dimulai dengan upaya-upaya yang dilakukannya saat mulai menjabat sebagai perdana menteri untuk menangani fenomena krisis tenaga kerja yang sudah terjadi cukup lama di Jepang.

1.6 Argumen Pokok

Dalam menghadapi isu masalah krisis tenaga kerja yang sedang terjadi di Jepang, pemerintahan Fumio Kishida banyak melakukan upaya dalam penyelesaiannya. Yang dimana upaya yang dilakukan berupa upaya internal hingga eksternal dengan menggunakan beberapa kebijakan didalamnya. Upaya Fumio Kishida menangani masalah krisis tenaga kerja pada upaya internal meliputi kebijakan sosial, yang berfokus pada demografi dengan meningkatkan angka kelahiran berupa dukungan anggaran dan juga peningkatan produktivitas angkatan kerja Jepang, Fumio Kishida juga melakukan upaya dengan melalui kebijakan ekonomi yaitu kapitalisme baru dengan melakukan peningkatan upah pekerja dan investasi teknologi. Adapun upaya eksternal juga menggunakan beberapa kebijakan, seperti kebijakan imigrasi dengan program *Visa Specified Skilled Workers (SSW)*, dan kerjasama internasional berupa kerjasama *Technical Intern Training Program (TITP)* serta Kerjasama *Economic Partnership Agreement (EPA)*.

1.7 Sistematika Penulisan

Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan

BAB I	Pendahuluan 1.1 Latar belakang 1.2 Rumusan masalah 1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian
--------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> 1.3.2 Manfaat penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1.3.2.1 Manfaat akademis 1.3.2.2 Manfaat praktis 1.4 Penelitian terdahulu 1.5 Teori/konsep <ul style="list-style-type: none"> 1.5.1 Kebijakan Publik (Public Policy) 1.6 Metode penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1.6.1 Tipe penelitian 1.6.2 Metode analisis 1.6.3 Teknik pengumpulan data <ul style="list-style-type: none"> 1.6.3.1 Batasan materi 1.6.3.2 Batasan waktu 1.7 Argumen pokok 1.8 Sistematika penelitian
<p style="text-align: center;">BAB II</p>	<p>Masalah Isu Krisis Tenaga Kerja Yang Terjadi di Jepang</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Penuaan Populasi 2.2 Penurunan Angka Kelahiran 2.3 Rendahnya Produktivitas Angkatan Kerja Jepang 2.4 Stagnasi Ekonomi Jepang 2.5 Berkurangnya Tenaga Kerja Pada Sektor-sektor Penting 2.6 Upaya Pemerintahan Shinzo Abe Menangani Krisis tenaga Kerja
<p style="text-align: center;">BAB III</p>	<p>Upaya Internal Fumio Kishida Dalam Menangani Krisis Tenaga Kerja di Jepang</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Kebijakan Sosial <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1 Peningkatan Angka Kelahiran <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1.1 Dukungan Anggaran Untuk Keluarga dan Anak 3.1.1.2 Peningkatan Fasilitas Penitipan Anak 3.1.2 Peningkatan Produktivitas Angkatan Kerja Jepang <ul style="list-style-type: none"> 3.1.2.1 Peningkatan Partisipasi Wanita Dalam Angkatan Kerja di Jepang 3.1.2.2 Mempekerjakan Kembali Lansia di Jepang 3.2 Kebijakan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> 3.2.1 Peningkatan Upah Pekerja di Jepang 3.2.2 Investasi Teknologi

<p>BAB IV</p>	<p>Upaya Eksternal Fumio Kishida Dalam Menangani Krisis Tenaga Kerja di Jepang</p> <p>4.1 Penerimaan Tenaga Kerja Asing</p> <p>4.1.1 Perluasan Sistem Visa <i>Specified Skilled Workers</i> (SSW)</p> <p>4.1.2 Kerjasama Internasional</p> <p>4.1.2.1 <i>Technical Intern Training Program</i> (TITP)</p> <p>4.1.2.2 Kerjasama <i>Economic Partnership Agreement</i> (EPA)</p>
<p>BAB V</p>	<p>Penutup</p> <p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>

